

## ABSTRAK

Aktivitas pertambangan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor perekonomian nasional namun secara bersamaan juga memberikan dampak negatif terhadap aspek lingkungan. Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi tambang dengan komoditas utama pasir dan batuan andesit memiliki persoalan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan. Berbagai macam persoalan lingkungan terjadi karena pertambangan yang dilakukan tanpa mengkedepankan aspek lingkungan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten berfungsi untuk melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang berwenang untuk melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Klaten dalam kaitannya dengan pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas tambang andesit. Di samping itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam menjalankan pengendaliannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum bisa dilaksanakan secara maksimal sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mengalami beberapa kendala yang dirumuskan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Penulis memberikan saran pada penelitian ini yakni 1) Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena hal tersebut berpengaruh terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi persoalan lingkungan yang timbul akibat aktivitas tambang andesit di Kabupaten Klaten. 2) pemerintah daerah diharapkan melakukan optimalisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten melalui pembuatan instrumen hukum yang mengatur terkait peningkatan anggaran dan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

**Kata kunci:** Pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kabupaten Klaten.